

**LAPORAN RAKOR PENGENDALIAN TINGKAT OPD  
PELAKSANAAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2026  
BULAN APRIL DI OPD DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN RAKOR

A. Waktu Penyelenggaraan Rakor

Jumat, 8 Mei 2026

B. Pimpinan Rakor

Kepala Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

C. Peserta Rakor

1. Sekretaris
2. Kepala Bidang
3. Kepala UPTD
4. Kepala Sub Bagian
5. Sub Koordinator
6. Bendahara Pembantu
7. Bendahara Pelaksana Pembantu
8. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
9. Pelaksanan pada masing-masing unit kerja

D. Notulis

Sub Bagian Program

II. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN SAMPAI DENGAN BULAN INI

A. Realisasi sampai dengan bulan ini

a. Fisik = 32,30 %

b. Keuangan = 6.680.768.710 (31,52%)

B. Kegiatan yang berdeviasi fisik

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Target Fisik (%)	Realisasi Fisik (%)	Realisasi Keuangan (Rp)	Deviasi Fisik (%)	Ket
<b>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>							
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>							
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>							
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	43.000.000			16.000.000		
1	Belanja Makan dan Minum Rapat	43.000.000	40,82	34,40	16.000.000	(6,42)	Menyesuaikan kebutuhan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38.862.000			1.405.000		
1	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kota	38.862.000	29,85	3,60	1.405.000	(26,25)	Menyesuaikan kebutuhan

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Kesetaraan Gender dan Perlindungan Perempuan**

**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan**

**Provinsi**

	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	40.800.000			2.750.000	
1	Pemantauan dan Evaluasi PUG	40.800.000	19,02	13,20	2.750.000	(5,82)

mengikuti jadwal KemenPPPA untuk verifikasi lapangan PPE

**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi**

	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	687.938.000			99.222.500	
1	Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan	294.570.000	22,90	21,13	62.206.500	(1,77)
2	Penguatan Peran Serta BKOW Provinsi Jawa Tengah dalam Pemberdayaan Perempuan	393.368.000	13,10	9,41	37.016.000	(3,69)

**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

**Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	45.046.000			3.200.000	
1	Peningkatan Kapasitas dan Advokasi Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO di Kabupaten/Kota	45.046.000	11,10	7,10	3.200.000	(4)

**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi**

	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	38.250.000			5.600.000	
1	Penguatan Kerjasama Bersama Mitra dalam Rangka Perlindungan Perempuan	38.250.000	16,08	15	5.600.000	(1,08)

**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**

**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak**

**Kewenangan Provinsi**

	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	18.650.000				0	
1	Fasilitasi Peningkatan Tim Ketahanan Keluarga Provinsi	18.650.000	25	0	0	(25)	kegiatan dipending karena bersamaan dengan pelaksanaan Fasilitasi RPPA

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak****PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA****Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	8.588.000				980.500	
1	Layanan Bimbingan Masyarakat bagi Kelompok Kader dan Keluarga dalam Pemenuhan Hak Anak	8.588.000	20,15	11,42	980.500	(8,73)	fokus kegiatan bulan ini pada pembentukan forum anak kecamatan berdaya dan kegiatan peringatan hari kartini

**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)****Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi**

	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	6.300.000				3.200.000	
1	Fasilitasi Partisipasi Anak dalam Pemenuhan Hak Anak	6.300.000	50,80	25,40	3.200.000	(25,40)	terbalik skknnya saat menginput rko

**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK****Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	23.000.000				5.000.000	
1	Pelaksanaan advokasi pencegahan	23.000.000	34,80	21,74	5.000.000	(13,06)	peserta yang diundang dalam kegiatan

kekerasan  
terhadap anak

advokasi  
pencegahan  
kekerasan  
terhadap anak  
adalah ASN  
sehingga uang  
harian peserta  
tidak dibagikan

**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota**

	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	13.586.000			5.727.000		
1	Pelaksanaan Pelatihan Disiplin Positif bagi Lembaga Pendidikan	13.586.000	66,24	42,15	5.727.000	(24,09)	Kegiatan dilaksanakan bekerjasama dengan Kemenag Kab. Wonogiri, namun tidak memberikan UH peserta

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi**

**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**

**Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal**

	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	31.458.000			11.449.000		
1	Peningkatan Kapasitas Kader TPK Dalam Mendukung Program Bangga Kencana di Kecamatan Berdaya	31.458.000	44,36	36,39	11.449.000	(7,97)	Kegiatan pembuatan dan pemasangan media KIE Baliho yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan maret 2026 diundur menjadi bulan juni 2026 yang bertepatan dengan Peringatan Hari Keluarga Nasional (harganas)

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana - UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak**

**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi**

	layanan pendampingan	10.000.000			0		
--	----------------------	------------	--	--	---	--	--

	tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						
1	Layanan Pendampingan Tenaga Ahli bagi Anak Korban Kekerasan	10.000.000	10	0	0	(10)	Belum ada kebutuhan pendampingan tenaga ahli
	Jumlah SSK dengan Deviasi Fisik Negatid s/d Bulan ini :	14	0	0			
	Jumlah SSK dengan Anggaran yang di 0 kan :	0	0	0			

### III. PERMASALAHAN DAN HAMBATAN SERTA UPAYA PENYELESAIANNYA

#### IV. RENCANA KERJA BULAN BERJALAN

1. Penurunan angka stunting melalui kelompok BKB pada kegiatan posyandu di masyarakat di Desa Butuh Kidul, Kab. Wonosobo (KS);
2. Fasilitasi Pembentukan Sekolah Siaga Kependudukan dalam Rangka Gerakan Jo Kawin Bocah serta Cegah AKI dan Stunting (Dalduk);
3. Penggerakan KB bersama IBI dan Aisyiyah di Kab. Magelang dan Kab. Purworejo (KIE);
4. Pelayanan KB di Desa Dampingan (KB);
5. Fasilitasi Pembentukan Forum Anak Kecamatan di 15 Kecamatan (PHA);
6. Evaluasi dan verifikasi KLA di tingkat provinsi (by zoom) (PHA);
7. Advokasi PANDU CINTA (Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak) (PA);
8. Advokasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (PA);
9. Fasilitasi Pembentukan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kecamatan Berdaya di 15 Kecamatan (PP);
10. Pelatihan PPEP Tahap I (Assesment) di Kab. Pemalang & Kab. Wonosobo (desa dampingan) (KG);
11. Sosialisasi Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Berbagai Bidang Pembangunan (Dikpol) mengikuti jadwal DPRD. (awal Mei sudah terealisasi 2 titik) (KG);
12. Pendidikan Politik bagi Perempuan untuk Mendorong Kesetaraan dan Keadilan Gender - Aspirasi DPRD (KG);
13. Training of Trainers Fasilitator PUG (menunggu konfirmasi KemenPPPA) (KG);
14. Peningkatan Kapasitas Tim Teknis PUG Kabupaten Kota (menunggu konfirmasi KemenPPPA) (KG);
15. Ngopi Penak;
16. Capacity Building "Kepemimpinan Perempuan dalam Organisasi: Etika, Strategi, dan Kolaborasi" (DWP) (KG);
17. Desk Tindak Lanjut Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan/Anak di Kota Surakarta, Kab. Pemalang, Kab Banyumas (UPTD);
18. Layanan korban perempuan dan anak (rutin) (UPTD);
19. Rapat Pengendalian Internal (rutin) (Program);
20. Operasional kantor rutin (UK);
21. Bimtek identifikasi gap kompetensi dan Penyusunan IDP (UK).

#### V. PENUTUP

##### Stressing Pengendalian

1. Masing-masing pimpinan pada unit kerja memantau indikator kinerja serta realisasi keuangan/fisiknya
2. Apabila target kinerja fisik maupun keuangan belum bisa terpenuhi, dimohon untuk menjelaskan permasalahan dan upaya pemecahannya dalam narasi yang singkat dan jelas;
3. Para Pejabat eselon 3 dan 4 serta sub koordinator masing-masing Bidang/Seksi, agar memperhatikan capaian target kinerja mulai dari indikator tujuan, sasaran, kegiatan, sub kegiatan sampai dengan sub sub kegiatan;
4. Masing-masing unit kerja/pemilik resiko pada bidang dan sekretariat, agar memperhatikan manajemen resiko yang sudah dibuat dan menjalankan rencana tindak pengendaliannya secara optimal;
5. Memperhatikan pencapaian target-target indikator dalam RPJMD 2025-2029;
6. Dimohon masing-masing bidang/seksi dan sekretariat mencermati kembali Rancangan kegiatan (target

dan sasaran) dengan memperhatikan isu prioritas (nasional dan provinsi) serta isu strategis lainnya;

Demikian laporan pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah bulan April 2026, untuk menjadikan periksa.

Semarang, Jumat, 8 Mei 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA



Dra. EVA RACHMAWATI, M.Hum  
NIP. 196605171990082001